

RINGKASAN

Administrator publik bukanlah aktor netral yang tidak memiliki nilai dalam setiap pelayanan publik. Mereka memiliki landasan berupa nilai-nilai pelayanan publik dalam praktik administrasi publik yang memandu dan menjadikan prioritas pekerjaan. Pelayanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba sejatinya bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi dan kerusakan atau kecacatan pada kondisi kesehatan individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Namun dalam praktiknya, para klien yang menjalani program rehabilitasi tidak selalu menyelesaikan program rehabilitasi secara tuntas. Kemungkinan akan *relapse* menjadi tinggi dan tidak akan menyelesaikan masalah ketergantungan yang dihadapi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program rehabilitasi dengan menggunakan nilai-nilai empati, etika, keterlibatan dan keadilan sosial sehingga dapat ditemukan model manajemen kebijakan rehabilitasi yang lebih optimal. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan metode kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa rehabilitasi belum optimal melalui penerapan nilai-nilai pelayanan publik dalam program rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purbalingga. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah para pelaksana program rehabilitasi yang ada di Klinik Pratama BNN Kabupaten Purbalingga, guru sekolah, petugas IBM, dan klien rehabilitasi.

Temuan dari penelitian ini yaitu dalam proses rehabilitasi yang dimulai dari tahap penerimaan awal sampai dengan reintegrasi sosial, petugas rehabilitasi menggunakan nilai etika sebagai landasan dalam pelayanan publik. Sehingga dalam pelaksanaannya petugas mengintegrasikan nilai empati, keterlibatan, keadilan sosial. Tidak optimalnya pelaksanaan rehabilitasi diakibatkan adanya motivasi yang tidak sejalan dan karakteristik dari klien rehabilitasi yang berasal dari *compulsory*. Selanjutnya, dikarenakan adanya benturan aturan yang diterapkan oleh pihak eksternal dalam menyikapi penyalahgunaan narkoba khususnya bagi kalangan pelajar. Masa sekolah yang dijalani oleh pelajar tersebut terputus dan berakibat pada tidak selesainya proses rehabilitasi. Faktor selanjutnya adalah keterlibatan lingkungan masyarakat yang belum maksimal. Keterlibatan sosial penting dibangun untuk mengurangi stigma yang melekat pada klien rehabilitasi sehingga proses reintegrasi sosial dapat berjalan dengan baik. Selain itu, klien rehabilitasi juga tidak dapat tertampung pada dunia kerja yang diakibatkan oleh faktor stigma tersebut. Terakhir, masih terdapat kesenjangan pelayanan rehabilitasi yang belum merata menjangkau masyarakat sampai di setiap aspek dan wilayah di Kabupaten Purbalingga. Dari permasalahan tersebut, maka diperlukan pelayanan rehabilitasi yang melandaskan pada nilai keadilan sosial dengan aspek humanis, inklusif, partisipatif, dan setara. Melalui nilai empati, etika, dan keterlibatan dengan segala aspek-aspek yang melekat maka dapat mencapai rehabilitasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Kata kunci : empati, etika, keadilan sosial, keterlibatan, rehabilitasi

SUMMARY

Public administrators are not neutral actors who have no value in any public service. They have a foundation in the form of public service values in public administration practices that guide and prioritize work. Rehabilitation services for drug abusers actually aim to optimize the function and damage or disability of individual health conditions in interacting with their environment. However, in practice, clients who undergo rehabilitation programs do not always complete the rehabilitation program completely. The possibility of relapse is high and will not solve the dependence problem faced.

This research aims to analyze the implementation of rehabilitation programs using the values of empathy, ethics, involvement and social equity so that a more optimal rehabilitation policy management model can be found. This research was conducted in the Purbalingga Regency area using qualitative methods. The focus of this research is to find out why rehabilitation has not been optimal through the application of public service values in the rehabilitation program for drug abuse victims in Purbalingga Regency. In this study, the informants were the implementers of the rehabilitation program at the Primary Clinic of BNN Purbalingga Regency, school teachers, IBM officers, and rehabilitation clients.

The findings of this study indicate that throughout the rehabilitation process, from initial admission to social reintegration, rehabilitation officers use ethical values as the foundation for public service. Consequently, in their implementation, officers integrate the values of empathy, involvement, and social justices. The non-optimal implementation of rehabilitation is due to inconsistent motivation and the characteristics of rehabilitation clients who come from compulsory. Furthermore, due to the conflict of rules applied by external parties in addressing drug abuse, especially for students. The school period undertaken by the student was interrupted and resulted in the non-completion of the rehabilitation process. The next factor is the involvement of the community environment that has not been maximized. Social involvement is important to reduce the stigma attached to rehabilitation clients so that the social reintegration process can run well. In addition, rehabilitation clients also cannot be accommodated in the world of work due to the stigma factor. Finally, there is still a gap in rehabilitation services that have not evenly reached the community to every aspect and region in Purbalingga Regency. From these problems, rehabilitation services are needed that are based on social equity values with humanist, inclusive, participatory, and equal aspects. Through the values of empathy, ethics, and involvement with all inherent aspects, it can achieve sustainable and sustainable rehabilitation.

Keywords: empathy, engagement, ethics, rehabilitation, social equity